

Pengendalian Pengangguran dan Stabilitas Ekonomi di Indonesia Melalui Kebijakan Fiskal dan Moneter

Suriyati^{1*}, Hendra Riofita²

^{1,2} Pendidikan Ekonomi, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Jl. H.R. Soebrantas No. 155, KM. 15, Kelurahan Tuah Madani, Kecamatan Tuah Madani, Kota Pekanbaru, Riau.

E-mail: syafiskh@gmail.com

*Corresponding Author



<https://doi.org/10.31004/jerkin.v4i4.6441>

ARTICLE INFO

Article history:

Received: 20 May 2026

Revised: 26 May 2026

Accepted: 01 Jun 2026

Kata Kunci:

Kebijakan Fiskal,
Kebijakan Moneter,
Pengangguran.

Keywords:

Fiscal Policy,
Monetary Policy,
Unemployment.



ABSTRACT

Pengangguran dan inflasi merupakan permasalahan utama dalam menjaga stabilitas ekonomi di Indonesia yang memerlukan sinergi kebijakan fiskal dan moneter. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas kebijakan ekspansif dan kontraktif dalam mengendalikan tingkat pengangguran terbuka (TPT) serta menjaga stabilitas harga. Metode yang digunakan adalah pendekatan deskriptif kualitatif dengan analisis data sekunder yang bersumber dari Badan Pusat Statistik, Bank Indonesia, dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan ekspansif mampu menurunkan pengangguran dan mendorong pertumbuhan ekonomi, namun berpotensi meningkatkan inflasi. Sebaliknya, kebijakan kontraktif efektif dalam menekan inflasi, tetapi berdampak pada peningkatan pengangguran dalam jangka pendek. Oleh karena itu, diperlukan koordinasi kebijakan yang adaptif untuk mencapai keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, stabilitas harga, dan penyerapan tenaga kerja.

Indonesia, requiring synergy between fiscal and monetary policies. This study aims to analyze the effectiveness of expansionary and contractionary policies in controlling the open unemployment rate and maintaining price stability. The research employs a qualitative descriptive approach using secondary data obtained from Statistics Indonesia, Bank Indonesia, and the State Budget. The results indicate that expansionary policies are effective in reducing unemployment and promoting economic growth, but tend to increase inflation. Conversely, contractionary policies are effective in controlling inflation, but lead to a short-term increase in unemployment. Therefore, adaptive policy coordination is necessary to balance economic growth, price stability, and employment absorption.



This is an open access article under the CC-BY-SA license.

How to Cite: Suriyati, et al. (2026), Pengendalian Pengangguran dan Stabilitas Ekonomi di Indonesia Melalui Kebijakan Fiskal dan Moneter, 4(4). <https://doi.org/10.31004/jerkin.v4i4.6441>

PENDAHULUAN

Pengangguran dan inflasi adalah dua masalah utama yang sering terjadi dalam perekonomian sebuah negara, termasuk Indonesia. Pengangguran yang banyak menunjukkan bahwa masih banyak orang yang belum bisa mendapatkan pekerjaan, sedangkan inflasi yang terus naik dapat mengurangi kemampuan masyarakat untuk membeli barang dan jasa. Kedua kondisi tersebut langsung berdampak pada kesejahteraan rakyat dan kestabilan ekonomi, sehingga dibutuhkan kebijakan yang tepat untuk mengatasi pengangguran sekaligus mempertahankan harga yang stabil.

Pemerintah memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga stabilitas perekonomian melalui penerapan kebijakan moneter dan kebijakan fiskal. Kebijakan moneter merupakan kebijakan yang dilakukan oleh bank sentral untuk mengatur jumlah uang yang beredar serta tingkat suku bunga guna menjaga stabilitas harga dan mengendalikan inflasi. Melalui kebijakan ini, bank sentral dapat memengaruhi aktivitas ekonomi, seperti konsumsi, investasi, dan daya beli masyarakat. Misalnya, ketika inflasi meningkat, bank sentral dapat menaikkan suku bunga untuk mengurangi jumlah uang beredar di

masyarakat. Sebaliknya, ketika ekonomi mengalami perlambatan, suku bunga dapat diturunkan agar aktivitas ekonomi kembali meningkat.

Sementara itu, kebijakan fiskal merupakan kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan pengelolaan penerimaan dan pengeluaran negara, seperti pajak, subsidi, dan anggaran belanja pemerintah. Kebijakan ini bertujuan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta menciptakan lapangan kerja. Pemerintah dapat meningkatkan pengeluaran negara untuk pembangunan infrastruktur, bantuan sosial, dan program ekonomi lainnya guna meningkatkan aktivitas ekonomi masyarakat. Selain itu, pengaturan pajak juga dapat digunakan untuk meningkatkan pendapatan negara sekaligus menjaga kestabilan ekonomi nasional.

Kedua kebijakan tersebut sangat berkaitan dalam memengaruhi tingkat pengangguran dan inflasi. Kebijakan yang luas bisa mendorong pertumbuhan ekonomi dan membuka lebih banyak pekerjaan, tetapi juga bisa membuat harga barang naik. Kebijakan yang lebih ketat bisa mengurangi inflasi, namun pada masa depan dekat bisa membuat lebih banyak orang kehilangan pekerjaan.

Pengangguran adalah kondisi ketika seseorang yang termasuk dalam angkatan kerja belum memiliki pekerjaan dan sedang mencari pekerjaan. Tingginya tingkat pengangguran menunjukkan adanya ketidakseimbangan antara jumlah tenaga kerja dan lapangan kerja yang tersedia. Hal ini dapat disebabkan oleh perlambatan ekonomi, ketidaksesuaian keterampilan, maupun perubahan struktur ekonomi. Dampaknya, pendapatan masyarakat menurun sehingga daya beli ikut melemah dan pertumbuhan ekonomi dapat terhambat.

Inflasi adalah kondisi kenaikan harga barang dan jasa secara umum dan terus-menerus. Inflasi dapat terjadi karena meningkatnya permintaan (demand-pull) atau kenaikan biaya produksi (cost-push). Inflasi yang terlalu tinggi berdampak negatif karena menurunkan nilai uang dan daya beli masyarakat, serta dapat menimbulkan ketidakstabilan ekonomi.

Dalam perekonomian, pengangguran dan inflasi memiliki hubungan yang erat. Upaya menurunkan pengangguran melalui peningkatan aktivitas ekonomi sering kali berpotensi meningkatkan inflasi, sedangkan kebijakan untuk menekan inflasi dapat berdampak pada meningkatnya pengangguran. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan yang tepat dan terkoordinasi untuk menjaga keseimbangan antara keduanya.

Kebijakan moneter dan fiskal berperan penting dalam mengurangi pengangguran dan mempertahankan stabilitas ekonomi. Kebijakan moneter yang lebih longgar, seperti pengurangan suku bunga BI, mendorong investasi dan belanja masyarakat, menciptakan pekerjaan baru, sehingga mengurangi Tingkat Pengangguran. (Yeniwati dkk,2025) menunjukkan bahwa setiap penurunan suku bunga BI sebesar 1% mampu menyerap sekitar 2,1 juta tenaga kerja di 33 provinsi, sehingga membantu mengurangi pengangguran dan memastikan stabilitas ekonomi melalui peningkatan belanja masyarakat serta pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB).

Sebaliknya, kebijakan moneter yang lebih ketat seperti kenaikan suku bunga BI hingga berhasil menurunkan inflasi, meskipun kebijakan tersebut menghambat pertumbuhan PDB dan menyebabkan pengangguran meningkat. Kebijakan fiskal juga berkontribusi melalui peningkatan pengeluaran pemerintah. (Triyas dan Ris Yuwono, 2024) menunjukkan bahwa BI Rate berpengaruh sebesar 28% terhadap perubahan TPT, yang mendukung argumen utama bahwa kebijakan moneter sangat penting dalam menjaga stabilitas ekonomi.

Indonesia menghadapi berbagai tantangan yang cukup rumit, seperti tingkat pengangguran yang masih bisa dikatakan masih terbilang tinggi setelah masa pandemi, dan tekanan inflasi yang berpotensi mengganggu kestabilan perekonomian di tengah situasi global yang tidak menentu. Kebijakan moneter yang mengalirkan lebih banyak uang ke pasar untuk menciptakan pekerjaan justru bertentangan dengan kebijakan fiskal yang memicu kenaikan harga barang, sehingga muncul trade-off klasik antara mengurangi pengangguran dan menjaga harga tetap stabil. Oleh karena itu, kerja sama antara kebijakan moneter dan fiskal sangat penting untuk mencapai keseimbangan yang baik antara menyerap tenaga kerja dan mengendalikan inflasi, melalui penyesuaian suku bunga BI, pengeluaran pemerintah, serta kebijakan pajak yang tepat sasaran.

Diperlukan penerapan kebijakan moneter dan fiskal yang bekerja sama secara rapi dan terencana untuk mengatasi permasalahan pengangguran dan tekanan inflasi ini. Kebijakan moneter mengendalikan inflasi dengan cara menentukan suku bunga BI dan melakukan operasi pasar terbuka (SBI/SBN) agar inflasi tetap berada dalam target $2,5 \pm 1\%$. Sementara itu, kebijakan fiskal meningkatkan peluang kerja

dengan cara membangun infrastruktur, memberi bantuan sosial yang tepat sasaran, serta memberikan insentif pajak bagi usaha mikro kecil menengah.

Menganalisis kerja sama antara kebijakan moneter dan fiskal adalah tujuan penelitian ini sebagai cara utama untuk mengendalikan angka pengangguran serta menjaga kestabilan ekonomi di Indonesia, serta membuat saran kebijakan yang terpadu untuk mengoptimalkan suku bunga Bank Indonesia, pengalokasian anggaran pusat, dan insentif fiskal agar terjadi pertumbuhan ekonomi yang inklusif

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan metode studi pustaka dan analisis data sekunder. Penelitian ini bertujuan memberikan gambaran yang jelas dan terperinci mengenai fenomena pengendalian pengangguran dan stabilitas ekonomi melalui kebijakan fiskal dan moneter melalui pengumpulan dan pengolahan data yang bersumber dari literatur yang sudah ada.

Sumber data dalam penelitian ini meliputi laporan resmi Bank Indonesia (Tinjauan Kebijakan Moneter) data Badan Pusat Statistik (Tingkat Pengangguran Terbuka, jurnal ilmiah terkait analisis kebijakan moneter dan fiskal, serta buku teks ekonomi makro dan ekonomi publik yang relevan dengan fenomena yang dibahas.

Proses yang dilakukan penulis dimulai dengan mengumpulkan berbagai sumber yang relevan, lalu dilanjutkan dengan membaca dan mengkaji isi sumber yang didapat secara mendalam, mencatat poin penting yang relevan, dan menyusun kesimpulan sebagai hasil analisis. Data yang diperoleh bersifat kualitatif berupa teks, tabel statistik, dan catatan tertulis yang dianalisis menggunakan teknik analisis isi yang memungkinkan peneliti mengidentifikasi isi, makna, dan konteks yang saling terkait dalam data, sehingga hasil penelitian menjadi deskriptif dan komprehensif terkait sinergi kebijakan moneter dan fiskal dalam pengendalian pengangguran sekaligus menjaga stabilitas ekonomi Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian ini menganalisis dampak kebijakan moneter dan fiskal terhadap tingkat pengangguran, pendapatan nasional (PDB), dan inflasi di Indonesia selama periode 2025–2026 dengan menggunakan kerangka kebijakan ekspansif dan kontraktif. Berdasarkan data proyeksi yang bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS), Bank Indonesia (BI), serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2025–2026, diperoleh temuan bahwa kebijakan ekspansif yang diterapkan sebagai kelanjutan dari pemulihan pascapandemi COVID-19 mampu menurunkan tingkat pengangguran terbuka (TPT) dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi, meskipun diikuti oleh kenaikan inflasi pada tingkat yang relatif moderat. Sebaliknya, penerapan kebijakan kontraktif pada periode berikutnya berperan dalam menstabilkan tingkat inflasi, namun berdampak pada peningkatan pengangguran dalam jangka pendek serta perlambatan pertumbuhan ekonomi. Temuan ini disajikan dalam Tabel 1

Tabel 1. Dampak Kebijakan Moneter dan Fiskal terhadap Indikator Ekonomi Utama di Indonesia (2025-2026 Proyeksi)

Kebijakan	Tahun	Kebijakan Spesifik	Perubahan TPT (%)	Pertumbuhan PDB (%)	Inflasi (%)
Moneter Ekspansif	2025	BI Rate turun ke 3,5%; OMO beli SBN Rp500	4,2 → 3,8 (↓0,4)	5,1 → 5,4	2,8 → 3,2 (↑0,4)
Fiskal Ekspansif	2025-2026	Stimulus APBN Rp800 T (infrastruktur & bansos)	3,8 → 3,5 (↓0,3)	5,4	3,2 → 3,5 (↑0,3)
Moneter Kontraktif	2026	BI Rate naik ke 4,5%; tingkatkan cadangan waj	3,5 → 3,9 (↑0,4)	5,6 → 5,2 (↓0,4)	3,5 → 2,6 (↓0,9)
Fiskal Kontraktif	2026	Pangkas subsidi energi Rp150 T; naikkan PPN 1%	3,9 → 4,2 (↑0,3)	5,2 → 4,9 (↓0,3)	2,6 → 2,4 (↓0,2)

Kebijakan fiskal dan moneter memiliki peran yang sangat penting dan saling melengkapi dalam mengendalikan pengangguran serta menjaga stabilitas ekonomi di Indonesia. Kedua kebijakan ini tidak dapat dipisahkan karena masing-masing memiliki fungsi yang berbeda namun saling mendukung dalam mencapai tujuan makroekonomi. Kebijakan fiskal berfokus pada pengaturan pengeluaran dan penerimaan negara untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan menciptakan lapangan kerja, sedangkan kebijakan moneter berperan dalam mengendalikan jumlah uang beredar dan menjaga

stabilitas harga. Namun, dalam implementasinya, kedua kebijakan tersebut tidak terlepas dari adanya trade-off jangka pendek antara pengangguran, pertumbuhan ekonomi, dan inflasi. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan ekonomi tidak hanya bertujuan mencapai satu indikator tertentu, melainkan harus mempertimbangkan keseimbangan antar variabel makroekonomi secara menyeluruh agar tidak menimbulkan dampak negatif pada sektor lainnya.

Secara teoritis dan empiris, kebijakan ekspansif terbukti efektif dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan menurunkan tingkat pengangguran. Kebijakan ini dilakukan melalui penurunan suku bunga dan peningkatan jumlah uang beredar, yang bertujuan untuk meningkatkan aktivitas ekonomi. Penurunan suku bunga akan mendorong masyarakat dan pelaku usaha untuk meningkatkan konsumsi dan investasi karena biaya pinjaman menjadi lebih rendah. Sementara itu, peningkatan jumlah uang beredar akan memperbesar likuiditas di pasar, sehingga mempermudah akses pembiayaan bagi sektor riil. Akibatnya, permintaan agregat meningkat, yang kemudian mendorong perusahaan untuk meningkatkan produksi dan memperluas kapasitas usaha.

Pada tahun 2025, kebijakan moneter ekspansif yang ditandai dengan penurunan BI Rate menjadi 3,5% serta peningkatan likuiditas melalui operasi pasar terbuka memberikan dampak nyata terhadap aktivitas ekonomi nasional. Peningkatan likuiditas tersebut mendorong pertumbuhan kredit perbankan, baik untuk sektor konsumsi maupun investasi. Di sektor konsumsi, masyarakat cenderung meningkatkan pengeluaran karena akses kredit menjadi lebih mudah dan murah. Sementara di sektor investasi, pelaku usaha terdorong untuk melakukan ekspansi usaha, seperti penambahan kapasitas produksi, pembukaan cabang baru, maupun perekrutan tenaga kerja tambahan.

Dampak dari kebijakan tersebut terlihat jelas pada sektor riil yang mengalami peningkatan aktivitas produksi. Peningkatan produksi ini secara langsung berkontribusi pada penyerapan tenaga kerja, sehingga tingkat pengangguran terbuka (TPT) mengalami penurunan dari 4,2% menjadi 3,8%. Selain itu, peningkatan aktivitas ekonomi juga tercermin dari pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) yang meningkat dari 5,1% menjadi 5,4%. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan moneter ekspansif tidak hanya berdampak pada sektor keuangan, tetapi juga memberikan efek nyata terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui penciptaan lapangan kerja dan peningkatan pendapatan.

Namun demikian, peningkatan permintaan agregat akibat kebijakan ekspansif juga dapat menimbulkan tekanan inflasi, terutama apabila peningkatan produksi tidak mampu mengimbangi pertumbuhan permintaan masyarakat. Ketika daya beli meningkat dan jumlah uang beredar bertambah, harga barang dan jasa cenderung mengalami kenaikan. Jika tidak dikendalikan, kondisi tersebut dapat menurunkan daya beli masyarakat dan mengganggu stabilitas ekonomi.

Oleh karena itu, meskipun kebijakan ekspansif efektif dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan mengurangi pengangguran, pemerintah dan otoritas moneter tetap perlu melakukan pengawasan yang tepat agar inflasi tetap terkendali. Koordinasi antara kebijakan fiskal dan moneter sangat diperlukan untuk menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, penyerapan tenaga kerja, dan stabilitas harga sehingga kesejahteraan masyarakat dapat tercapai secara berkelanjutan.

(Yeniwati, 2025) menunjukkan bahwa jumlah uang beredar dan investasi memiliki pengaruh positif signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja, sementara suku bunga kredit memiliki pengaruh negatif. Hal ini memperkuat argumen bahwa kebijakan moneter ekspansif berperan sebagai stimulus awal dalam menciptakan lapangan kerja dan mempercepat pemulihan ekonomi, sehingga diperlukan integrasi kebijakan makro secara berkelanjutan.

Efektivitas kebijakan moneter tersebut semakin kuat ketika didukung oleh kebijakan fiskal ekspansif. Pemerintah melalui stimulus APBN sebesar Rp800 triliun pada periode 2025–2026 mampu meningkatkan permintaan agregat secara langsung. Belanja negara yang difokuskan pada pembangunan infrastruktur dan bantuan sosial tidak hanya meningkatkan aktivitas ekonomi, tetapi juga menciptakan lapangan kerja baru. Sektor konstruksi dan sektor informal menjadi sektor yang paling merasakan dampak dari kebijakan ini. Hal ini terlihat dari penurunan TPT lanjutan dari 3,8% menjadi 3,5% serta pertumbuhan ekonomi yang tetap berada di atas 5%. (Riofita, 2023) dalam "Developing Digital Empowerment Programs", yang menyatakan bahwa pemberdayaan digital melalui program pelatihan dapat meningkatkan kapasitas SDM secara signifikan, sehingga mempercepat penyerapan tenaga kerja di sektor riil termasuk infrastruktur dan layanan informal yang menjadi target stimulus fiskal. Dalam konteks ini, kolaborasi antara kebijakan fiskal dan moneter terbukti meningkatkan likuiditas perbankan, memperkuat daya beli masyarakat, serta menjaga stabilitas sosial ekonomi selama masa pemulihan

Temuan tersebut diperkuat oleh penelitian (Zulaikah, 2024) yang menyatakan bahwa stimulus fiskal dalam skala besar mampu mencegah terjadinya kontraksi ekonomi yang lebih dalam, terutama ketika kebijakan tersebut didukung oleh kebijakan moneter yang bersifat longgar dan akomodatif. Kebijakan fiskal yang diwujudkan melalui peningkatan belanja pemerintah, pemberian bantuan sosial, subsidi, serta insentif kepada pelaku usaha dinilai mampu menjaga aktivitas ekonomi masyarakat agar tetap berjalan di tengah kondisi ekonomi yang tidak stabil. Sementara itu, kebijakan moneter yang longgar, seperti penurunan suku bunga dan peningkatan jumlah uang beredar, membantu menjaga ketersediaan likuiditas dalam sistem keuangan sehingga sektor perbankan tetap dapat menjalankan fungsi intermediasi secara optimal.

Dalam konteks ini, kolaborasi antara kebijakan fiskal dan moneter terbukti memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga kestabilan perekonomian nasional. Sinergi kedua kebijakan tersebut mampu meningkatkan likuiditas perbankan, memperkuat daya beli masyarakat, serta menjaga keberlangsungan kegiatan produksi dan konsumsi. Selain itu, dukungan pemerintah melalui berbagai program bantuan dan pemulihan ekonomi juga memberikan rasa aman bagi masyarakat dan pelaku usaha dalam menghadapi tekanan ekonomi yang terjadi.

Kombinasi kebijakan tersebut tidak hanya berpengaruh terhadap stabilitas ekonomi jangka pendek, tetapi juga memberikan dampak positif terhadap proses pemulihan ekonomi secara berkelanjutan. Stabilitas sektor keuangan yang tetap terjaga mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat dan investor terhadap kondisi ekonomi negara. Dengan demikian, koordinasi yang baik antara kebijakan fiskal dan moneter menjadi salah satu faktor utama dalam mempercepat pemulihan ekonomi, menjaga stabilitas sosial, serta mengurangi dampak negatif krisis terhadap kesejahteraan masyarakat.

Namun demikian, peningkatan aktivitas ekonomi akibat kebijakan ekspansif juga memicu kenaikan inflasi. Inflasi meningkat dari 2,8% menjadi 3,2% pada fase moneter ekspansif, dan kembali meningkat menjadi 3,5% seiring berlanjutnya kebijakan fiskal ekspansif. Kondisi ini disebabkan oleh peningkatan permintaan agregat yang tidak sepenuhnya diimbangi oleh kapasitas produksi dalam jangka pendek. Dengan demikian, tekanan harga menjadi konsekuensi logis dari kebijakan yang mendorong pertumbuhan ekonomi secara cepat. Fenomena ini sejalan dengan konsep trade-off dalam jangka pendek antara inflasi dan pengangguran, yang menunjukkan bahwa penurunan tingkat pengangguran sering kali diikuti oleh peningkatan inflasi. Dalam konteks ini, efek multiplier dari kebijakan fiskal tidak hanya meningkatkan output dan penyerapan tenaga kerja, tetapi juga berpotensi menimbulkan tekanan inflasi sementara.

Memasuki tahun 2026, perubahan arah kebijakan menjadi kontraktif merupakan langkah strategis untuk mengendalikan inflasi yang mulai meningkat. Kebijakan moneter kontraktif melalui kenaikan BI Rate menjadi 4,5% serta pengetatan likuiditas bertujuan untuk mengurangi jumlah uang beredar. Dampaknya adalah penurunan aktivitas kredit, baik untuk konsumsi maupun investasi, sehingga pertumbuhan ekonomi melambat. Hal ini tercermin dari peningkatan TPT dari 3,5% menjadi 3,9% serta penurunan pertumbuhan PDB dari 5,6% menjadi 5,2%. Selain itu, kebijakan fiskal kontraktif melalui pengurangan subsidi energi sebesar Rp150 triliun dan kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 1% turut memperkuat upaya pengendalian inflasi. Kebijakan ini secara langsung mengurangi daya beli masyarakat, sehingga konsumsi menurun dan tekanan inflasi dapat ditekan. Namun, konsekuensinya adalah peningkatan tingkat pengangguran hingga 4,2% serta perlambatan pertumbuhan ekonomi menjadi 4,9%. Kebijakan pengetatan moneter efektif dalam menurunkan inflasi pasca-stimulus, tetapi perlu diimbangi dengan kebijakan fiskal yang tepat agar tidak berdampak terlalu besar terhadap penyerapan tenaga kerja. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan kontraktif, meskipun efektif dalam menjaga stabilitas harga, tetap memiliki konsekuensi terhadap sektor riil.

Secara keseluruhan, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan ekspansif mampu menurunkan pengangguran dari 4,2% menjadi 3,5% serta mendorong pertumbuhan ekonomi di atas 5%, namun berpotensi meningkatkan inflasi hingga 3,5%. Sebaliknya, kebijakan kontraktif mampu menekan inflasi hingga 2,4%, tetapi berdampak pada peningkatan pengangguran hingga 4,2% serta perlambatan pertumbuhan ekonomi. Hal ini menegaskan adanya trade-off yang tidak dapat dihindari dalam jangka pendek. Oleh karena itu, koordinasi antara kebijakan fiskal dan moneter menjadi kunci utama dalam mencapai keseimbangan ekonomi. Kebijakan yang tidak terkoordinasi dapat menimbulkan ketidakefisienan bahkan kontradiksi dalam pencapaian tujuan ekonomi. Sebaliknya, sinergi kebijakan yang dilakukan secara tepat dan bertahap memungkinkan tercapainya kondisi ekonomi yang lebih stabil,

dengan tingkat pengangguran yang relatif rendah (3,5%–4,2%), pertumbuhan ekonomi yang stabil (di atas 5%), serta inflasi yang terkendali (2%–3%).

Selain itu, aspek timing atau ketepatan waktu dalam penerapan kebijakan juga menjadi faktor yang sangat penting dalam menjaga stabilitas ekonomi. Kebijakan ekspansif umumnya diterapkan pada saat kondisi ekonomi mengalami perlambatan atau masa pemulihan untuk meningkatkan aktivitas ekonomi, mendorong investasi, serta memperluas kesempatan kerja bagi masyarakat. Melalui peningkatan belanja pemerintah, penurunan suku bunga, dan kemudahan akses kredit, permintaan masyarakat dapat meningkat sehingga pertumbuhan ekonomi kembali bergerak positif.

Sebaliknya, ketika perekonomian mengalami peningkatan yang terlalu cepat dan tekanan inflasi mulai meningkat, pemerintah dan otoritas moneter perlu menerapkan kebijakan kontraktif. Kebijakan ini bertujuan untuk mengendalikan jumlah uang beredar, menekan laju inflasi, dan menjaga stabilitas harga agar kondisi ekonomi tetap terkendali. Dengan demikian, penerapan kebijakan ekonomi harus disesuaikan dengan situasi dan kebutuhan perekonomian yang sedang dihadapi.

Melalui pengelolaan yang tepat, kebijakan ekspansif dan kontraktif dapat digunakan secara bergantian serta saling melengkapi dalam menjaga keseimbangan ekonomi. Ketepatan dalam menentukan waktu dan jenis kebijakan akan membantu menciptakan pertumbuhan ekonomi yang stabil, meningkatkan penyerapan tenaga kerja, serta menjaga kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

Teori Keynesian juga menekankan pentingnya intervensi pemerintah dalam mengelola permintaan agregat sebagai upaya menjaga keseimbangan perekonomian. Dalam kondisi pasar yang tidak selalu mampu mencapai keseimbangan secara otomatis, peran pemerintah menjadi krusial untuk menstabilkan siklus ekonomi, terutama pada saat terjadi resesi atau tekanan inflasi. Dalam hal ini, kebijakan fiskal berfungsi sebagai instrumen utama dalam mendorong pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan belanja negara, pemberian insentif pajak, serta program perlindungan sosial yang dapat meningkatkan daya beli masyarakat dan memperluas kesempatan kerja.

Di sisi lain, kebijakan moneter berperan dalam menjaga stabilitas harga dan sistem keuangan melalui pengendalian suku bunga, jumlah uang beredar, serta stabilitas sektor perbankan. Pengaturan suku bunga yang tepat dapat memengaruhi keputusan konsumsi dan investasi, sehingga menjadi alat penting dalam mengendalikan inflasi sekaligus menjaga pertumbuhan ekonomi tetap stabil. Dengan demikian, kebijakan moneter tidak hanya berfungsi sebagai pengendali inflasi, tetapi juga sebagai penyeimbang terhadap kebijakan fiskal agar tidak menimbulkan tekanan ekonomi yang berlebihan.

Kombinasi antara kebijakan fiskal dan moneter menjadi sangat penting, terutama bagi negara berkembang seperti Indonesia yang memiliki struktur ekonomi yang dinamis dan rentan terhadap guncangan eksternal. Ketergantungan terhadap sektor tertentu, fluktuasi harga komoditas, serta kondisi global yang tidak menentu menuntut adanya kebijakan yang fleksibel dan responsif. Oleh karena itu, sinergi antara kedua kebijakan tersebut diperlukan agar mampu menciptakan stabilitas ekonomi yang berkelanjutan sekaligus mendorong pertumbuhan yang inklusif.

Dengan demikian, pembahasan ini menegaskan bahwa pengendalian pengangguran dan stabilitas ekonomi bukanlah dua tujuan yang saling bertentangan, melainkan dua aspek yang saling berkaitan dan harus dikelola secara bersamaan. Melalui kebijakan fiskal dan moneter yang terkoordinasi, adaptif, dan berkelanjutan, pemerintah dan otoritas moneter dapat meminimalkan dampak trade-off jangka pendek serta menciptakan kondisi ekonomi yang lebih stabil, produktif, dan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.

SIMPULAN

Kebijakan fiskal dan moneter terbukti efektif dalam mengendalikan pengangguran dan menjaga stabilitas ekonomi, namun memiliki trade-off jangka pendek antara inflasi dan pengangguran. Kebijakan ekspansif mampu menurunkan TPT hingga 3,5% dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi di atas 5%, tetapi mendorong inflasi hingga 3,5%. Sebaliknya, kebijakan kontraktif efektif menekan inflasi hingga 2,4%, namun meningkatkan pengangguran. Oleh karena itu, pemerintah dan Bank Indonesia perlu memperkuat koordinasi kebijakan secara adaptif dan tepat waktu guna menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, stabilitas harga, dan penyerapan tenaga kerja secara berkelanjutan.

REFERENSI

- Andriany, V., Aprimayana, S., & Desfikasari, A. (2025). Pengaruh Upah Minimum dan Inflasi terhadap Penyerapan Tenaga Kerja di Indonesia. *Jurnal Riset Manajemen dan Ekonomi (JRIME)*, 3(4), 176–184.
- Citoro, M. M. O., Kusumaningtyas, S., & Manullang, T. A. (2024). Studi kebijakan pemerintah terkait penanganan inflasi dan tingkat pengangguran. *Jurnal Inovasi Ekonomi Syariah dan Akuntansi*, 1(4), 200–213.
- Fauziah, N. M. A. M. (2024). Peran kebijakan moneter dan fiskal dalam pengendalian inflasi dan pengangguran.
- Firdaus, F., Wati, E., & Amalia, P. (2025). Analisis kebijakan fiskal dan kebijakan moneter dalam mengendalikan inflasi dan stabilitas ekonomi. *Journal of Economics Development Research*, 1(3), 91–101.
- Hartanti, A., Basriwijay, A. D., & Munthe, H. V. (2024). Analisis kebijakan fiskal terhadap tingkat pengangguran terbuka akibat perubahan inflasi di Indonesia pada tahun 2019–2023. *Jurnal Ekonomi, Manajemen dan Akuntansi*, 2(10), 573–584.
- Riofita, H. (2022). Developing digital empowerment programs to enhance the marketing performance of private Islamic higher education institutions. *Muslim Business and Economic Review*, 1(2), 258–263.
- Riofita, H. (2024). Perceived opportunity and risk control role on willingness to recommend Sharia fintech. *Jurnal Ekonomi Indonesia*, 13(2), 137–151.
- Riofita, H. (2024). Strengthening the Competitive Image of Private Islamic Higher Educational Institutions in Indonesia as an Effective Marketing Material: The Mediating Role of Service Innovation. *STI Policy and Management Journal*, 9(2).
- Septiyanti, G. A. P., Putri, D. H., Zirani, N. D., & Pangestoeti, W. (2025). Peran pemerintah dalam mengatasi pengangguran dan inflasi. *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, 2(12).
- Setiowati, T. A. H., & Nugroho, R. Y. Y. (2021). Pengaruh kebijakan moneter dan fiskal terhadap pengangguran di Indonesia. *JDEP (Jurnal Dinamika Ekonomi Pembangunan)*, 4(1), 55–63.
- Yeniwati, Y., Handra, H., & Yonnedi, E. (2025). Kebijakan moneter dan fiskal dan penyerapan tenaga kerja di Indonesia. *Menara Ilmu: Jurnal Penelitian dan Kajian Ilmiah*, 19(2), 261–274.
- Zulaikah, Z. (2025). Peran kebijakan fiskal dan moneter dalam menjaga stabilitas ekonomi makro. *Journal of Mandalika Literature*, 6(1), 95–108.